

BAB II

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

A. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

1. Pengertian PDRB

Menurut Sukirno (2016), PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah atau provinsi. Pengertian nilai tambah bruto adalah nilai tambah produksi (output) dikurangi dengan biaya antara. Komponen-komponen nilai tambah bruto mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menghitung nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan kemudian menjumlahkannya akan menghasilkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).¹⁰

Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan pada tahun 2007 mengatakan bahwa, PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah

¹⁰ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016).

dalam suatu periode tertentu. Hasil perhitungan PDRB biasa dikenal sebagai PDRB menurut lapangan usaha dan PDRB menurut penggunaan. PDRB menurut lapangan usaha merupakan total nilai tambah dari semua kegiatan di suatu wilayah dan pada periode waktu tertentu, sedangkan PDRB menurut penggunaan merupakan jumlah nilai barang dan jasa yang digunakan untuk konsumsi akhir. PDRB adalah nilai-nilai total atas segenap output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian di tingkat daerah (baik itu yang dilakukan oleh penduduk daerah maupun penduduk dari daerah lain yang bermukim di daerah tersebut). Seperti yang telah diuraikan di atas, angka pendapatan regional dalam beberapa tahun menggambarkan kenaikan dan penurunan tingkat pendapatan masyarakat di daerah tersebut.¹¹

2. Faktor - Faktor yang mempengaruhi kenaikan / penurunan

a. Kenaikan / penurunan riil, yaitu tingkat pendapatan yang tidak dipengaruhi oleh faktor perubahan harga. Apabila

¹¹ Bambang Prishardoyo, "Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Dan Potensi Ekonomi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Kabupaten Pati Tahun 2000-2005," *Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Dan Potensi Ekonomi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Kabupaten Pati Tahun 2000-2005* 1, no. 1 (2008): 1-9,

terjadi kenaikan riil pendapatan penduduk berarti daya beli penduduk di daerah tersebut meningkat, misalnya mampu membeli barang yang sama kualitasnya dalam jumlah yang lebih banyak.

b. Kenaikan / penurunan pendapatan yang disebabkan adanya faktor perubahan harga. Apabila terjadi kenaikan pendapatan yang hanya disebabkan inflasi (menurunnya nilai beli uang) maka walaupun pendapatan meningkat tetapi jumlah barang yang mampu dibeli belum tentu meningkat. Perlu dilihat mana yang meningkat lebih tajam, tingkat pendapatan atau tingkat harga.¹²

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolak ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, meskipun telah digunakan sebagai indikator pembangunan, pertumbuhan ekonomi masih bersifat umum dan belum mencerminkan kemampuan masyarakat secara individual. Pembangunan

¹² Rio Laksamana, "Pengaruh PDRB Terhadap Pengangguran Di Kabupaten/Kota Kalimantan Barat," *Jurnal Audit Dan Akuntansi* 5, no. 2 (2016): 111–34

daerah diharapkan akan membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.¹³

3. Pendekatan yang digunakan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator ekonomi makro yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan perekonomian suatu wilayah. Di dalam menghitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang ditimbulkan dari suatu region, pendekatan yang digunakan yaitu¹⁴:

a. PDRB menurut pendekatan produksi

Pendapatan ini sering disebut juga pendekatan nilai tambah dimana nilai tambah bruto dengan cara mengurangi nilai output yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan biaya antara lain dari masing-masing nilai produksi bruto dari setiap sektor ekonomi,

¹³ Himawan Yudistira Dama, Agnes L Ch Lapian, and Jacline I Sumual, "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Manado (Tahun 2005-2014)," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 16, no. 3 (2016): 549–61.

¹⁴ Bambang Prishardoyo, "Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Dan Potensi Ekonomi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Kabupaten Pati Tahun 2000-2005," *Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Dan Potensi Ekonomi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Kabupaten Pati Tahun 2000-2005* 1, no. 1 (2008): 1–9

nilai tambah ini merupakan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang diperoleh oleh unit produksi sebagai input antara nilai yang ditambahkan sama dengan balas jasa faktor produksi atas ikutsertaannya dalam proses produksi. Unit-unit produksi dalam penyajian ini dikelompokkan dalam 17 lapangan usaha yaitu :

- a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
- b. Pertambangan dan Penggalian
- c. Industri Pengolahan
- d. Pegadaan Listrik dan Gas
- e. Pegadaan Air, Pengolahan Sampah dan Limbah Daur Ulang
- f. Kontruksi
- g. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
- h. Transportasi dan Pergudangan
- i. Penyediaan Akomodasi dan Makan dan Minum
- j. Informasi dan Komunikasi
- k. Jasa Keuangan dan Asuransi

- l. Real Estate
- m. Jasa Perusahaan
- n. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
- o. Jasa Pendidikan
- p. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
- q. Jasa Lainnya

Produksi dapat dipahami sebagai kegiatan untuk menciptakan suatu barang atau jasa yang memiliki nilai tambah. Berkenaan dengan hal tersebut, perhitungan pendapatan nasional melalui pendekatan produksi dilakukan dengan menjumlahkan nilai tambah dari seluruh sektor produksi dalam 1 tahun. Cara ini diformulasikan sebagai berikut.

$$Y = \{ (P1 \times Q1) + (P2 \times Q2) + \dots + (Pn \times Qn) \}$$

Keterangan :

Y = pendapatan nasional

P1 = harga barang ke-1

P2 = harga barang ke-2

Pn = harga barang ke-n

Q1 = jenis barang ke-1

Q2 = jenis barang ke-2

Qn = jenis barang ke-n

B. Tenaga Kerja

1. Pengertian Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan menurut pasal 1 UU No. 13 Tahun 2003 adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum masa kerja misalnya adalah kesempatan kerja, perencanaan tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja, sedangkan hal sesudah masa kerja, misalnya adalah masalah pensiun.¹⁵

Definisi Angkatan Kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja, sementara tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Penduduk kurang dari 15 tahun meskipun telah melakukan pekerjaan untuk memenuhi / membantu kebutuhan hidup tidak termasuk kategori angkatan kerja. Angkatan Kerja merupakan bagian dari aspek demografi penduduk yang mempunyai kecenderungan bertambah atau

¹⁵ Undang-Undang No.13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 64

menurun sejalan dengan perubahan yang dialami oleh penduduk itu sendiri. Hal ini terjadi karena faktor alamiah seperti kelahiran, kematian maupun perpindahan yang menuju pada bergesernya pola kependudukan secara keseluruhan.¹⁶

2. Tenaga Kerja Sebagai Faktor Produksi

Salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam proses produksi adalah tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan input yang tidak saja memiliki komponen fisik namun juga daya pikir, dan perasaan. Kedudukan faktor produksi tenaga kerja sehingga suatu proses produksi tidak akan berjalan tanpa adanya unsur manusia baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁷

3. Hak-hak Tenaga Kerja

- a. Para buruh harus memperoleh upah yang semestinya agar dapat menikmati taraf hidup yang layak.
- b. Seorang buruh tidak dapat diberi pekerjaan yang melampaui kekuatan fisik yang dimilikinya dan apabila

¹⁶ “Badan Pusat Statistik,” Penduduk dan Ketenagakerjaan, 2014.

¹⁷ Subandi, *Ekonomi Pembangunan* (Jakarta, 2016).

suatu waktu ia dipercaya melakukan pekerjaan yang berat, harus disediakan bantuan dalam bentuk tenaga kerja atau modal yang lebih banyak atau keduanya.

c. Buruh juga harus memperoleh bantuan medis jika sakit dan dibantu membayar biaya perawatannya pada saat itu.

d. Ketentuan yang wajar harus dibuat untuk pembayaran pensiun yang lanjut usia. Pengusaha dan pekerja dapat diminta untuk memberikan kontribusinya sebagai dana bantuan.

e. Para pengusaha harus diberi dorongan untuk menafkahkan sedekah mereka (amal yang dilakukan dengan sukarela) pada para pekerja dan anak-anak.

f. Mereka harus memberi jaminan asuransi pada para pengangguran selama masih menganggur dari dana zakat. Hal itu akan memperkuat kekuasaan mereka dan

akan membantu menstabilkan tingkat upah dalam negeri pada tingkat yang wajar.¹⁸

4. Kewajiban Bekerja dan Memproduksi dalam Tinjauan Islam

Di antara maqashid syariah adalah kewajiban bekerja dan memproduksi. Kewajiban ini berdasarkan istiqrā' terhadap dalil-dalil yang memberikan dalalah qath'iah (makna yang pasti) bahwa bekerja dan produksi itu hukumnya wajib sesuai dengan firman Allah SWT yang artinya :

“dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya dan hanya kepada-Nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”(QS. Al-Mulk [67]:15)

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan untuk berjalan di muka bumi ini untuk mencari rezeki Allah SWT.

¹⁸ Fordebi and Adesy, *Ekonomi Dan Bisnis Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016).

Dalam konteks maqashid, mencari rezeki menjadi wajib untuk menyediakan kebutuhan harta dari aspek wujud karena tanpa bekerja, tidak mungkin ada uang dan harta. Merealisasikan hifdzul mal dari sisi bagaimana mendapatkannya (min janibi al wujud) sama halnya dengan merealisasikan harta yang sudah dimiliki (min janibi al-adam). Di antara ketentuan dalam syariat ini yang merealisasikan maqashid kewajiban bekerja ini diantaranya adalah bahwa syariat ini memberikan hak kepada pengelola usaha dalam bagi hasil untuk mendapatkan keuntungan atas usahanya. Dan sebaliknya, ketentuan yang melarang pengelola usaha untuk mendapatkan haknya tersebut itu bertentangan maqashid ini. Di antaranya juga, syariat ini melindungi kepemilikan seseorang selama harta tersebut dihasilkan dengan cara-cara yang halal. Syariat ini telah memberikan kewenangan dan hak kepada setiap pemilik barang/jasa untuk memanfaatkannya dan menggunakannya dengan cara-cara yang dibolehkan syariat ini. Dan sebaliknya, syariat ini melarang setiap perilaku yang merampas hak kepemilikan ini seperti mencuri, perampasan dan pengrusakan terhadap hak orang lain. Objek kepemilikan yang

dilindungi oleh syariat ini mencakup 2 hal, yaitu : Memiliki fisik barang tersebut (milk al-yad) dan memiliki manfaatnya. Oleh karena itu, dilarang menghalangi dan mempersulit pemilik barang untuk mengelolanya dan memanfaatkannya karena bertentangan dengan maqashid syariah dalam melindungi hak kepemilikan setiap orang karena itu hasil kerjanya yang legal (masyru').¹⁹

5. Perhitungan Jumlah Tenaga Kerja, Waktu dan Output

Menghitung jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk menghasilkan output tertentu di waktu kerja yang telah ditentukan²⁰ :

a. Jumlah tenaga kerja = (ST x Output) : Waktu Kerja

Menghitung waktu kerja yang diperlukan untuk menghasilkan output tertentu dengan menggunakan jumlah tenaga kerja yang ditentukan :

b. Waktu kerja = (ST x Output) : Jumlah Tenaga Kerja

¹⁹ Oni Sahroni and Adiwarmarman A. Karim, *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017).

²⁰<https://produksielektronik.com/menghitung-jumlah-tenaga-kerja-output-dan-waktu-kerja-di-produksi> Menghitung Jumlah Tenaga (di akses pada 7 desember 2020 pukul 22.10 WIB)

Menghitung output yang didapat jika menggunakan jumlah tenaga kerja dan waktu kerja tertentu :

$$c. \text{ Output} = (\text{ waktu kerja} \times \text{ jumlah tenaga kerja}) : \text{ ST}$$

Untuk menghitung Standart Time (ST). Rumusnya sebagai berikut :

$$d. \text{ Standard Time} = (\text{ waktu kerja} \times \text{ jumlah tenaga kerja}) :$$

Output.

C. Pengangguran

1. Pengertian Pengangguran

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Menurut Sukirno (2016), Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam Angkatan Kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat

memperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur.²¹

Terdapat 3 kelompok angkatan kerja berdasarkan pendekatan pemanfaatan tenaga kerja (labour utilization approach), antara lain :

- a. Menganggur (Unemployed), yaitu mereka yang sama sekali tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan
- b. Setengah menganggur (Underemployed), yaitu mereka yang bekerja tetapi belum dimanfaatkan secara penuh.
- c. Bekerja penuh (Employed), yaitu orang-orang yang bekerja penuh atau jam kerjanya mencapai 35 jam per minggu. Dalam membicarakan mengenai pengangguran yang selalu diperhatikan bukanlah mengenai jumlah pengangguran, tetapi mengenai tingkat pengangguran yang dinyatakan sebagai persentasi dari angkatan kerja. Untuk melihat keterjangkauan pekerja (kesempatan bekerja), maka digunakan rumus Tingkat Pengangguran Terbuka. Definisi dari tingkat pengangguran

²¹ Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*.

terbuka ialah persentase penduduk yang mempersiapkan usaha, yang mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dari sejumlah angkatan kerja.²²

2. Faktor-faktor yang Menimbulkan Pengangguran

a. Menganggur karena ingin mencari kerja lain yang lebih baik

b. Pengusaha menggunakan peralatan produksi modern yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, dan

c. Tidak sesuai antara keterampilan pekerja yang sebenarnya dengan keterampilan yang diperlukan dalam industri-industri.²³

3. Jenis-jenis Pengangguran

a. Pengangguran Alamiah

Pengangguran yang berlaku pada tingkat kesempatan kerja penuh. Kesempatan kerja penuh

²² Novegya Ratih Primandari, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi , Inflasi Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Sumatera Selatan" 16, no. 1 (2018): 1-10.

²³ ali ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro*, 2016.

adalah keadaan dimana 95% dari angkatan kerja dalam suatu waktu sepenuhnya bekerja. Pengangguran sebanyak 5% ini yang disebut pengangguran alamiah.

b. Pengangguran Friksional

Suatu jenis pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seorang pekerja untuk meninggalkan pekerjaannya dan mencari kerja yang lebih baik atau lebih sesuai dengan keinginannya.

c. Pengangguran Struktural

Pengangguran yang diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi. 3 sumber utama yang menjadi penyebab pengangguran struktural adalah :

1. Perkembangan teknologi, yang semakin maju membuat permintaan barang dari industri yang memproduksi barang-barang yang kuno menurun dan akhirnya tutup dan pekerja di industri ini akan menganggur. Pengangguran

ini disebut sebagai pengangguran teknologi yang ada.

2. Kemunduran yang disebabkan oleh adanya persaingan dari luar negeri yang mampu menghasilkan produk yang lebih baik dan lebih murah akan membuat permintaan akan barang lokal menurun. Industri lokal yang tidak mampu bersaing akan bangkrut sehingga timbul pengangguran.
3. Kemunduran perkembangan ekonomi suatu kawasan sebagai akibat dari pertumbuhan yang pesat di kawasan lain.

d. Pengangguran konjungtor

Pengangguran yang melebihi pengangguran alamiah. Pada umumnya pengangguran konjungtor berlaku sebagai akibat pengangguran dalam permintaan agregat. Penurunan permintaan agregat mengakibatkan

perusahaan mengurangi jumlah pekerja atau gulung tikar, sehingga muncul pengangguran konjungtor.²⁴

4. Cara Menghitung Tingkat Pengangguran

Perbandingan antara jumlah angkatan kerja yang menganggur dengan angkatan kerja keseluruhannya disebut Tingkat Pengangguran. Untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah bisa didapat dari persentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja.²⁵

$$\text{Tingkat Pengangguran} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran } X}{\text{Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

D. Indeks Pembangunan Manusia

1. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia diklasifikasikan oleh lembaga UNDP (United Nation Development Program) sebagai “suatu proses untuk memperluas berbagai macam pilihan bagi

²⁴ Darussamin and Sindi Paramita Sari, “Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan.”

²⁵ Khairur Rizki and Ekonomi D I Indonesia, “Inflasi” 2, no. 1 (2016).

penduduk”. Dengan demikian, IPM merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan manusia. United Nation Development Program (UNDP) telah menerbitkan laporan pembangunan sumber daya insani dalam satuan kuantitatif yang disebut dengan Human Development Indeks (HDI).²⁶

Pertumbuhan ekonomi selalu bersumber dari satu atau lebih dari 3 faktor kenaikan kuantitas dan kualitas tenaga kerja (melalui pertumbuhan jumlah penduduk dan perbaikan pendidikan), penambahan modal dan teknologi. Sedangkan salah satu alat ukur mengukur pembangunan kualitas dan kuantitas tenaga kerja adalah IPM. Indeks Pembangunan Manusia merupakan suatu indeks komposit yang mencakup yang mencakup 3 bidang pembagian manusia yang dianggap sangat mendasar yaitu : kesehatan yang diukur dari rata-rata usia harapan hidup, pengetahuan dan pendidikan yang diukur

²⁶ Moh Muqorrobin and Adi Soejoto, “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Perumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur,” *Jurnal Pendidikan Ekonomi* 5, no. 3 (2017).

dari rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf dan standar hidup layak (kesejahteraan) secara keseluruhan.²⁷

2. Indikator Indeks Pembangunan Manusia

Menurut United Nation Development Programme (UNDP Indonesia), indikator-indikator yang dipilih untuk mengukur dimensi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah:

1. Longevity, diukur dengan variabel harapan hidup saat lahir atau life expectancy of birth dan angka kematian bayi per seribu penduduk.
2. Educational Achievement, diukur dengan dua indikator, yaitu melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas (adult literacy rate) dan tahun rata-rata bersekolah bagi penduduk 25 ke atas (the mean years of schooling).
3. Access to resourcen dapat diukur secara makro melalui PDB riil per kapita dengan terminologi

²⁷ Aris Budi dan Lucky Rachmawati, “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Lamongan” 5, no. 3 (2017).

purchasing power parity dalam dolar AS dan dapat dilengkapi dengan tingkatan angkatan kerja.²⁸

Konsep pembangunan manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0 - 100,0 dengan kategori sebagai berikut :

- 1.Tinggi : IPM lebih dari 80,0
- 2.Menengah Atas : IPM antara 66,0 - 79,9
- 3.Menengah Bawah : IPM antara 50,0 - 65,9
- 4.Rendah : IPM kurang dari 50,0

3. Ilustrasi Penghitungan IPM

Rumus penghitungan IPM dapat disajikan sebagai berikut :

$$\mathbf{IPM} = \frac{1}{3} [\mathbf{X}_{(1)} + \mathbf{X}_{(2)} + \mathbf{X}_{(3)}] \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan :

$X_{(1)}$: Indeks harapan hidup

$X_{(2)}$: Indeks pendidikan = $\frac{2}{3}$ (indeks melek huruf) + $\frac{1}{3}$ (indeks rata-rata lama sekolah)

²⁸ Dwi Mahroji and Lin Nurkhasanah, “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Banten” 9, no. 1 (2019).

$X_{(3)}$: Indeks standar hidup layak

Masing-masing indeks komponen IPM tersebut merupakan perbandingan antara selisih suatu nilai indikator dan nilai minimumnya dengan selisih nilai maksimum dan nilai minimum indikator yang bersangkutan.²⁹

E. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Pengaruh Tenaga Kerja, Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kota Palembang Tahun 2008-2018.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama/Judul Penelitian	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Setiyadi (2008)	Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengangguran, Upah Minimum terhadap IPM di Provinsi Riau	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengangguran berpengaruh Negatif terhadap IPM	Variabel Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia	Variabel Tenaga Kerja, Produk Domestik Regional Bruto
2.	Magdalena (2009)	Analisis Pengaruh PDRB, inflasi dan UKMK terhadap penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Sumatera	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh Positif terhadap Tenaga Kerja	Variabel PDRB, Tenaga Kerja	Variabel Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia

²⁹ Patris Sagoyo, "Indeks Pembangunan Manusia," vol. 66, 2012, 37–39.

		Utara			
3.	Handayani (2011)	Analisis Pengaruh PDRB, Investasi, Tingkat Upah terhadap Kesempatan Kerja di Provinsi Sumatera Selatan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh Positif terhadap Kesempatan Kerja	Variabel PDRB, Kesempatan Kerja	Variabel Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia
4.	Hidayahwati (2011)	Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh Negatif terhadap Pengangguran	Variabel PDRB, Pengangguran	Variabel Tenaga Kerja, Indeks Pembangunan Manusia
5.	Whisnu Adi Saputra (2011)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Tenaga Kerja terhadap IPM di Provinsi Jawa Timur	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tenaga Kerja berpengaruh Positif terhadap IPM	Variabel Tenaga Kerja, Indeks Pembangunan Manusia	Variabel Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto
6.	Suroso (2012)	Analisis Pengaruh IPM dan Inflasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Riau	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa IPM berpengaruh Positif terhadap PDRB	Variabel IPM, Produk Domestik Regional Bruto	Variabel Tenaga Kerja, Pengangguran
7.	Sussy Susanti (2013)	Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, IPM terhadap Kemiskinan di Jawa Barat	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh Positif terhadap Kemiskinan	Variabel PDRB, Pengangguran, IPM	Variabel Tenaga Kerja
8.	Ahmad Jazuli (2016)	Analisis Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, dan Tenaga Kerja terhadap PDRB di Kota Banten	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tenaga Kerja berpengaruh Negatif terhadap PDRB	Variabel Tenaga Kerja, PDRB	Variabel Pengangguran, IPM
9.	Alhudori (2017)	Analisis Pengaruh IPM, PDRB dan Jumlah Pengangguran terhadap Penduduk Miskin di Kota Jambi	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa IPM berpengaruh Negatif terhadap Penduduk Miskin	Variabel IPM, PDRB, Pengangguran	Variabel Tenaga Kerja

10.	Valentine Brahma (2019)	Analisis Pengaruh PDRB, Inflasi, Upah Minimum dan Jumlah Penduduk terhadap Pengangguran di Indonesia	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif terhadap Pengangguran	Variabel PDRB, Pengangguran	Variabel Tenaga Kerja, IPM
-----	-------------------------	--	---	-----------------------------	----------------------------

Sumber : Dikumpulkan dari berbagai referensi, 2019

F. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Tenaga Kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Menurut Todaro, pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan tenaga kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestik.

Pertumbuhan penduduk yang meningkat dari waktu ke waktu akan mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang ada. Namun jumlah tenaga kerja yang besar harus diikuti dengan kualitas tenaga kerja memadai. Sehingga, keadaan tersebut mampu meningkatkan kapasitas produksi dan mampu memacu

pertumbuhan ekonomi. Input tenaga kerja dilihat dari kualitas dan kreativitas angkatan kerja. Tenaga kerja yang melimpah harus diikuti dengan kualitas angkatan kerja. Kemajuan teknologi yang semakin cepat akan efektif apabila digunakan oleh tenaga kerja yang terampil dan terlatih, dengan adanya perbaikan dalam bidang pendidikan, kesehatan serta disiplin tenaga kerja akan menambah produktivitas tenaga kerja. Semakin tinggi jumlah tenaga kerja yang produktif maka akan meningkatkan output yang dihasilkan sehingga hal tersebut dapat meningkatkan PDRB dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ridwan Effendi (2014) menunjukkan bahwa Tenaga Kerja berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto.³⁰ berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis, yaitu :

H1 : Tenaga Kerja berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto

³⁰ Effendi Ridwan, “Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sembilan Sektor Ekonomi Di Sumatera Selatan.”

2. Pengaruh Pengangguran terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Menurut Sukirno (2016), Pengangguran adalah segolongan tenaga kerja yang telah berusaha mencari pekerjaan tetapi tidak memperolehnya. Tingkat pengangguran dapat dilihat kondisi suatu kota, apakah perekonomiannya berkembang atau tidak dan atau mungkin mengalami kemunduran. Selain itu tingkat pengangguran, dapat dilihat pula dari ketimpangan atau kesenjangan distribusi pendapatan yang diterima suatu masyarakat kota tersebut. Pengangguran dapat terjadi sebagai akibat dari tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya lapangan kerja yang cenderung kecil persentasenya, dikarenakan tingkat pertumbuhan penciptaan tenaga kerja yang siap bekerja sangat rendah. Pengangguran ini dapat menimbulkan masalah sosial seperti tindakan kriminalitas dan masalah ekonomi. Kondisi ini dapat menyebabkan tingkat kesejahteraan, produktivitas dan daya beli masyarakat semakin menurun. Oleh karena itu semakin tinggi angka pengangguran maka akan menurun tingkat kemakmuran masyarakat sehingga dapat menurunkan

tingkat PDRB suatu daerah dan pertumbuhan ekonomi menjadi terlambat. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan M. Wardiansyah dan Zainul Bahri (2016) menunjukkan bahwa Pengangguran berpengaruh Negatif terhadap Produk Domestik Regional Bruto.³¹ Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis, yaitu :

**H2 : Pengangguran tidak berpengaruh terhadap
Produk Domestik Regional Bruto**

3. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Pembangunan manusia memainkan peran dalam membentuk kemampuan sebuah kota dalam menyerap teknologi modern untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta

³¹ Wardiansyah and Bahri, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran (Studi Kasus Provinsi-Provinsi Se-Sumatera)."

kesempatan kerja untuk meningkatkan produktivitas dan kemampuan masyarakat guna melakukan pembangunan manusia yang berkelanjutan. Hubungan pembangunan manusia dengan pertumbuhan ekonomi sangat erat sekali dan merupakan prasyarat terciptanya pembangunan manusia. Upaya perbaikan kualitas pembangunan manusia akan mendukung peningkatan produktivitas dan usaha-usaha produktif yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan. Dimana semakin tinggi kualitas sumber daya manusia maka akan meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga dapat meningkatkan PDRB dan pertumbuhan ekonomi menjadi tinggi. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Firda Amalia dan Ida Purbadharmaja (2014) menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto.³² Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis, yaitu :

H3 : Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto

³² Amalia and Purbadharmaja, “Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Dan Keserasian Alokasi Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.”

4. Pengaruh Tenaga Kerja, Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Menurut Santi Nurmainah (2013), jumlah tenaga kerja yang besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestik. Pertumbuhan penduduk yang meningkat dari waktu ke waktu akan mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang ada. Upaya perbaikan kualitas pembangunan manusia akan mendukung peningkatan produktivitas dan usaha-usaha produktif yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia akan meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga dapat meningkatkan PDRB dan pertumbuhan ekonomi menjadi tinggi.³³ Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis yaitu :

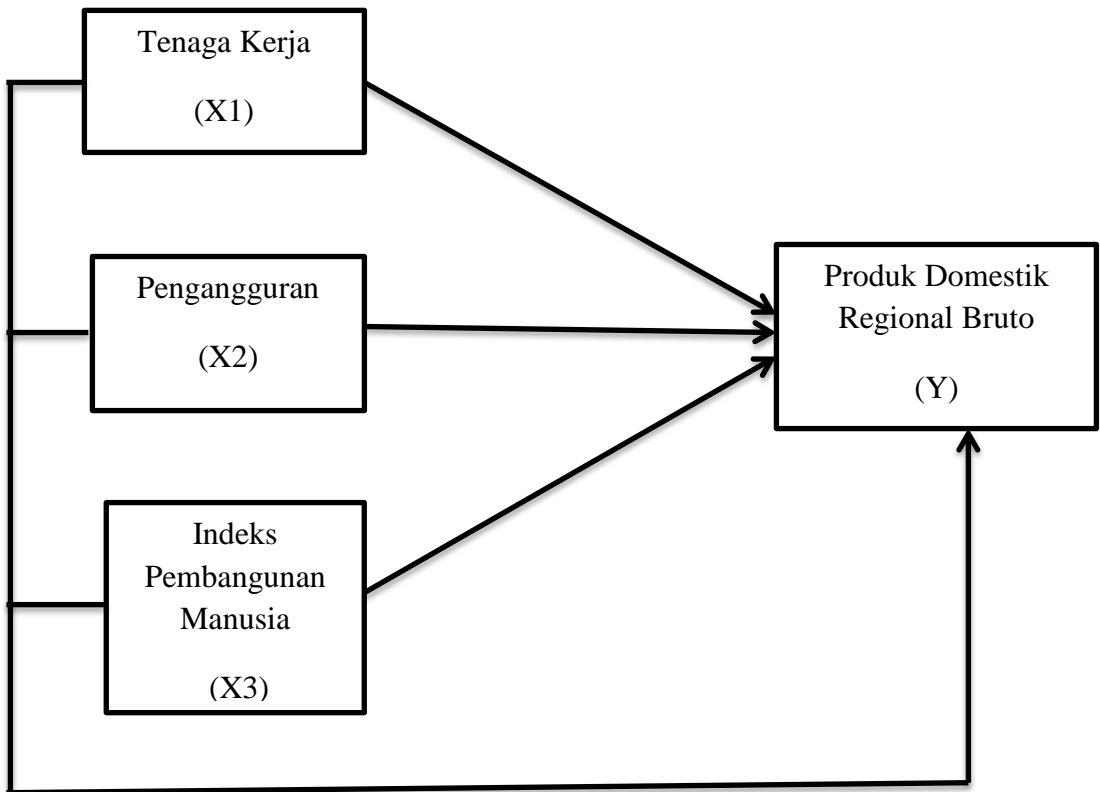
H4 : Tenaga Kerja, Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap PDRB

³³ Santi Nurmainah, “Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah, Tenaga Kerja Terserap Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan” 20, no. 2 (2013): 131–41.

G. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Dalam penelitian ini, peneliti menguji Pengaruh Tenaga Kerja, Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kota Palembang Tahun 2008-2018.

H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis Penelitian merupakan jawaban sementara atas pertanyaan yang dapat diuji. Maka ada keterkaitan antara perumusan masalah dengan hipotesis. Dengan demikian, pernyataan hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah yang diajukan.³⁴

Berdasarkan uraian identifikasi masalah dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan, maka hipotesis atau dugaan sementara yang diambil dalam penelitian ini, yaitu :

H1 : Tenaga Kerja berpengaruh terhadap PDRB

H2 : Pengangguran tidak berpengaruh terhadap PDRB

H3 : Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap PDRB

H4 : Tenaga Kerja, Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh simultan terhadap PDRB

³⁴ Suryani dan Hendrayadi, *Metode Riset Kuantitatif*, Edisi Kedu (Jakarta: Prenadamedia sGroup, 2015).